

## **ABSTRACT**

*This research is motivated by not optimal implementation of government policy on underage marriage (Studies in Religion Court Cimahi Class 1A, District Soreang Bandung). Based on the background of the study, researchers identified the problem as follows:*

- 1. How Implementation of Government Policy On Underage Marriage Religious Court Cimahi In Class 1A?*
- 2. What are the obstacles in the implementation of government policy on underage marriage?*
- 3. How is the effort made by the Religious Courts Cimahi about underage marriage?*
- 4. What is the public response about underage marriage?*

*The theory used in this research is the theory of policy implementation of Edwards III in the implementation of policies that include communication, resources, disposition / attitude and bureaucratic structure.*

*Based on the theoretical approach, we propose the following proposition:*

- 1. Implementation of Government Policy On Underage marriages (the study of the Religious Courts Cimahi Class 1A, District Soreang Bandung) takes optimal approach the factors of policy implementation that consists of communication, resources, disposition / attitude and bureaucratic structure.*
- 2. Inhibiting the implementation of government policy on underage marriage.*
- 3. The efforts made by the Religious Courts Cimahi Class 1A on underage marriage.*
- 4. The response from the public about underage marriage?*

*The method used is descriptive research, with a qualitative approach. Data obtained through literature, participant observation, interview and documentation. With the unit of analysis in research apparatus Religious Court Cimahi Class 1A (Judges and Secretariat), the head of KUA and Community that includes parents and couples who married underage.*

*The results of this study indicate that the implementation of Government Policy On Marriage Underage (Study on Religious Courts Cimahi Class 1A, Soreang Bandung District) is not optimal with the lack of socialization conducted by the Religious Courts Cimahi, low quality of human resources, society is less a form of performance of officers which has not been optimal in socializing.*

*Keywords: Implementation, Policy, Marriage Underage.*

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya implementasi kebijakan pemerintah tentang perkawinan di bawah umur ( Studi pada Pengadilan Agama Cimahi Kelas 1A, Soreang Kabupaten Bandung). Berdasarkan latar belakang penelitian, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Cimahi Kelas 1A ?
- 2) Apa yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan pemerintah tentang perkawinan di bawah umur ?
- 3) Bagaiman upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Cimahi tentang perkawinan di bawah umur ?
- 4) Apa tanggapan masyarakat tentang perkawinan di bawah umur ?

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari Edwards III dalam implementasi kebijakan yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap, dan struktur birokrasi.

Berlandaskan pada pendekatan teori tersebut, peneliti merumuskan proposisi sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Perkawinan Di Bawah Umur (studi pada Pengadilan Agama Cimahi Kelas 1A, Soreang Kabupaten Bandung) berlangsung optimal melalui pendekatan faktor-faktor implementasi kebijakan yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap, dan struktur birokrasi.
2. Penghambat dalam implementasi kebijakan pemerintah tentang perkawinan di bawah umur.
3. Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Cimahi Kelas 1A tentang perkawinan di bawah umur.
4. Tanggapan masyarakat tentang perkawinan di bawah umur ?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka, observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Dengan unit analisis dalam penelitian Aparat Pengadilan Agama Cimahi Kelas 1A (Hakim dan Kesekretariatan), Kepala KUA dan Masyarakat yang meliputi para orang tua dan pasangan yang menikah di bawah umur.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Perkawinan Di Bawah Umur (studi pada Pengadilan Agama Cimahi Kelas 1A, Soreang Kabupaten Bandung) belum optimal dengan masih minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Cimahi,rendahnya kualitas sumberdaya manusia, masyarakat yang kurang wujud kinerja aparat yang belum optimal dalam mensosialisasikan.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Perkawinan Di Bawah Umur.